

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kerinci)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi*



Disusun Oleh:

ASMANIAR. G. PUTRI. SM

NPM : 211001311008

DOSEN PEMBIMBING :

Mukhlizul Hamdi, SE,M.Si.,Ak.,CA

PRODI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM
AKUJNTANSI KEUANGAN DERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Oleh:

Nama : ASMANIAR.G.PUTRISM

NPM : 2110011311008

Tim Penguji

Ketua



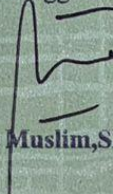
(Mukhlizul Hamdi, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

Sekretaris



(Dr. Fivi Angraini, SE.,M.Si.,Ak.,CA)

Anggota



(Resti Yulistia Muslim,SE.,M.Si.,Ak.,CA)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pada tanggal 06 Maret 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bung Hatta



(Dr. Listiana, S.M., S.E., MM)

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Asmaniar Gus Lena Putri¹, Mukhlizul Hamdi²
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Email: iput28642@gmail.com¹, mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kerinci. Latar belakang penelitian ini didorong oleh pentingnya mewujudkan good governance melalui transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, di mana instrumen utamanya adalah laporan keuangan yang berkualitas dan mudah diakses. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Objek penelitian ini berfokus pada pengguna laporan keuangan di wilayah Kabupaten Kerinci. Populasi dalam penelitian mencakup pihak-pihak terkait pengelolaan dan pengawasan keuangan, sementara sampel yang diambil berjumlah 150 responden yang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan masyarakat setempat. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Accidental Sampling (Convenience Sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas, meskipun dalam praktiknya di Kabupaten Kerinci tingkat aksesibilitasnya dinilai masih rendah karena belum dipublikasikan secara luas melalui situs web resmi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana penggunaan aplikasi seperti SIMDA sangat membantu proses transparansi dan pelaporan.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

The Influence of Regional Financial Report Presentation, Regional Financial Report Accessibility and Regional Financial Accounting System on Regional Financial Management Accountability

Asmaniar Gus Lena Putri¹, Mukhlizul Hamdi²
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta

Email: iput28642@gmail.com¹, mukhlizul.hamdi@bunghatta.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the impact of regional financial report presentation, accessibility, and the regional financial accounting system on the accountability of regional financial management in Kerinci Regency. The background to this research is the importance of realizing good governance through transparency and accountability in the use of public funds, where the primary instrument is high-quality and easily accessible financial reports. The research method used was a quantitative approach with a descriptive approach. The research object focused on users of financial reports in Kerinci Regency. The population included parties involved in financial management and oversight, while a sample of 150 respondents, consisting of members of the Kerinci Regency Regional People's Representative Council (DPRD) and the local community, was selected. The sampling technique used was accidental sampling (convenience sampling). The research results indicate that the presentation of regional financial reports has a positive and significant impact on accountability in regional financial management. Accessibility of regional financial reports has a positive impact on accountability, although in practice in Kerinci Regency, the level of accessibility is considered low because it has not been widely published on the official website. The regional financial accounting system has a positive and significant impact on accountability in regional financial management, where the use of applications such as SIMDA significantly facilitates transparency and reporting processes.

Keywords: *Presentation of Financial Reports, Accessibility, Regional Financial Accounting System, Accountability in Regional Financial Management.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Akuntabilitas	11
2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)	12
2.1.4 Keuangan Daerah	14
2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan Daerah	16
2.1.6 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	21
2.1.7 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	22
2.1.8 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.2 Pengembangan Hipotesis	27
2.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	27
2.2.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	28
2.2.3 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	30
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Populasi dan sampel	33

3.3.1	Populasi.....	33
3.3.2	Sampel.....	33
3.4	Definisi Operasional Variabel	34
3.4.1	Variabel Dependen.....	34
3.4.2	Variabel Independen	34
1.	Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1).....	34
2.	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2).....	35
3.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3).....	35
4.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).....	35
3.5	Sumber dan Pengumpulan Data	35
3.5.1	Sumber data.....	35
3.5.2	Pengumpulan data	36
3.6	Metode Analisis Data	39
3.6.1	Statistik Deskriptif	39
3.7	Uji Kualitas Data	39
3.7.1	Uji validitas	39
3.7.2	Uji reliabilitas.....	40
3.8	Uji Asumsi Klasik	40
3.8.1	Uji Normalitas.....	40
3.8.2	Uji Multikolonieritas	41
3.8.3	Uji Heteroskedastisitas	41
3.9	Analisis Regresi Berganda	42
3.10	Uji Hipotesis	42
3.10.1	Uji Parsial (Uji t).....	42
3.10.2	Uji Simultan (Uji F)	42
3.10.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	43
BAB IV	44
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	44
4.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian	44
4.1.2	Karakteristik Responden	45
4.1.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	45

4.1.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia Responden	45
4.1.5	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	46
4.2	Analisis Data Hasil Penelitian	48
4.2.1	Uji Validitas	48
4.2.2	Uji Reliabilitas	49
4.3	Uji asumsi klasik	50
4.3.1	Uji Normalitas	50
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas	51
4.3.3	Uji Multikolinieritas	52
4.4	Analisis Regresi Berganda	53
4.5	Uji Hipotesis.....	55
4.5.1	Uji Parsial (Uji t).....	55
4.5.2	Uji Kelayakan Model (uji F).....	57
4.5.3	Uji Koefisiensi Determinasi (R ²).....	57
4.6	Pembahasan.....	58
4.6.1	Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.....	59
4.6.2	Aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	60
4.6.3	Sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Dalam konteks ini, penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah menjadi instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Puji A, (2024) laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat atau mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya.

Menurut Karnavian, (2022) banyak dari kepala daerah yang tidak paham pisisi keuangan, mereka hanya mementingkan eksekusi setiap program Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU ini merupakan

dan menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. UU ini mengatur hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta prinsip pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Menurut Zamzam, (2023) kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan, dalam pemeriksaan memberikan pendapat apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan yang ada atau tidak.

Perkembangan teknologi saat ini mendorong masyarakat menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam memberikan informasi kepada publik. Hal ini, seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap kebijakan, tindakan dan kinerjanya. Menurut Mardiasmo, (2010) akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan serta mengungkapkan segala kegiatan atau aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2023 (IHPD). BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi laporan hasil pemeriksaan semester II badan pemeriksa keuangan, (2023) Dalam LHP BPK Nomor 18.A/LHP/XVIII.JMB/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 karena terdapat realisasi pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa Persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan kelebihan pembayaran Belanja Honorarium yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Honorarium Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp15,73 miliar dan Rp489,04 juta. Selain itu, terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar Rp1,31 miliar. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Honorarium Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp13,24 miliar dan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN telah mendapatkan persetujuan Kementerian.

Dalam Negeri melalui Surat Nomor 900.1.1/12148/Kedua tanggal 13 Juni 2023. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2022 dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1,20 miliar dan telah menerbitkan Surat Edaran Penjabat Bupati Kerinci Nomor 900/192/IV/BPKPD2024 untuk meningkatkan pengendalian atas verifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 12 (100%) LKPD pada 12 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi, di antaranya terdapat empat opini WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) dan satu opini WTP dengan Paragraf Hal Lain (PHL). Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh satu pemerintah provinsi (100%), sembilan pemerintah kabupaten (100%) dan dua pemerintah kota (100%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 93%, 82%, dan 93% pada Tahun 2023.

Tren opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020 - 2023 di Provinsi Jambi Secara rinci, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1, sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Opini atas LKPD TA 2020 s.d. 2023 Pemda Se-Provinsi Jambi

No	Entitas Pemeriksaan Daerah	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1.	Pemprov Jambi	WTP	WTP-PSH	WTP
2.	Pemkot Jambi	WTP	WTP	WTP-PSH
3.	Pemkot Sungai Penuh	WTP-PSH	WTP	WTP-PSH
4.	Pemkab Batang Hari	WTP	WTP	WTP
5.	Pemkab Bungo	WTP-PHL	WTP	WTP
6.	Pemkab Kerinci	WTP-PSH	WDP	WTP-PHL
7.	Pemkab Muaro Jambi	WTP	WTP	WTP
8.	Pemkab Merangin	WTP	WTP	WTP
9.	Pemkab Sarolangun	WTP	WTP	WTP
10.	Pemkab Tanjung Jabung Barat	WTP	WTP	WTP
11.	Pemkab Tanjung Jabung Timur	WTP	WTP	WTP-PSH
12.	Pemkab Tebo	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan selama 3 tahun terakhir mendapatkan opini yang berbeda-beda dari BPK. Dari sisi penyimpangan yang menyebabkan indikasi kerugian negara dan sampai ke ranah tindak pidana korupsi pun masih marak terjadi. Banyak kepala dan pemimpin daerah lain yang tersangkut kasus korupsi bahkan pemimpin di tingkat kelurahan pun pernah ada yang tersandung kasus korupsi. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan SKPD masih belum memenuhi standar yang seharusnya dan tidak berkualitas hal tersebut dapat ditunjukkan dari laporan keuangan yang mendapatkan berbagai opini. Oleh karena itu diperlukannya perbaikan terhadap struktur, prosedur dan sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan terutama penyusunan laporan keuangan di daerah yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah yang ada sehingga terciptalah akuntabilitas keuangan daerah untuk mencapai *good governance* dan *clean government*

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Miftahul, (2017). Aksesibilitas adalah proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 Ayat 4 tahun 2008 yang berisi tentang kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang Memiliki kepercayaannya terhadap pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi terkait keuangan pemerintah yang nantinya masyarakat dapat memberikan evaluasi terkait kinerja pemerintah Hehanussa, (2015).

Kurangnya keterbukaan dan transparansi menyebabkan misinformasi, spekulasi, dan kerusakan kepercayaan publik. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat mendukung program pembangunan. Transparansi penting dalam pemerintah karena dapat meminimalkan potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya, Badan pemeriksa keuangan, (2025).

Menurut Anwar, (2022) menemukan bahwa anggaran terbatas untuk pengembangan sistem, anggaran biaya yang dibatasi untuk dibelanjakan.. keterbatasan ini mempengaruhi kinerja tim, seperti pengembangan produk, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Disebab oleh perencanaan yang lemah, anggaran yang kurang tepat, pembuatan anggaran tidak sesuai, dan tidak didukung oleh masyarakat.

Agar akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki pemerintah Rizka, (2021). Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Kaomaneng, (2020).

Menurut Fitriati, (2022) pengelolaan keuangan akan terwujud secara efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, melaksanakan, dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan. Aditya, (2020) apabila program yang direncanakan dibuat tidak tepat sasaran, maka tidak dapat mengharapkan hasil yang baik. Zamzam, (2023) menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dimasa datang tanpa mengandalkan pendanaan dari luar.

Menurut Saleh, (2024) rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah dapat disebabkan Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip dasar dalam tata kelola yang baik (*Good governance*). Transparansi berarti keterbukaan dan aksesibilitas informasi, sementara akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas pengelolaan dana atau sumber daya.

Peneliti memilih 3 variabel yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan serta sistem akuntansi keuangan yang merupakan 3 faktor yang sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai variabel

independen yang akan diteliti yang mana sudah dijelaskan sebelumnya 3 variabel ini masih memiliki kendala-kendala tersendiri yang terjadi di pemerintahan sehingga membuat peneliti ingin lebih mengetahui apakah dengan adanya kendala-kendala tersebut apakah masih dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau tidak, dan apakah pemerintah daerah juga sudah melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala tersebut. Peneliti juga memilih pemerintah kabupaten Kerinci sebagai objek yang akan diteliti karena peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya dan apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan sistem pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya apabila akan melanjutkan penelitian ini atau akan meneliti dengan topik bahasan yang sama dan berkaitan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab sesuai dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, hipotesis penelitian untuk setiap variabel yang mempengaruhi dan

kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis, objek, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan daerah.